LAPORAN TRIWULAN II

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

JLN. KAPTEN P TENDEAN PALEMBANG 31129
Telp/Fax : (0711) 354715

KATA PENGANTAR

Kualitas belanja yang baik merupakan kondisi ideal yang ingin di wujudkan dalam pengelolaan APBD. Untuk mendorong tercapainya tujuan dan sasaran tidak hanya di pengaruhi oleh penyerapan belanja saja tetapi harus didukung oleh perencanaan anggaran yang lebih baik, penetapan anggaran yang lebih tepat waktu dan pelaksannan anggaran yang lebih disiplin. Tetapi harus diakui saat ini kondisi tersebut belum sepenuhnya bisa dicapai. Hal itu antara lain tercermin dari pergerakan realisasi penyerapan belanja APBD yang belum berjalan optimal.

Guna memperoleh informasi mengenai hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan melakukan analisis yang dituangkan dalam bentuk laporan monitoring realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 secara berkala yaitu per triwulan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi infomasi mengenai kondisi APBD pada triwulan II tahun 2026 sehingga dapat dijadikan input untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah dengan tujuan mendorong OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya agar kedepan melakukan penyerapan anggaran yang berkualitas dan belanja yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga laporan ini memberikan manfaat bagi pengambilan kebijikan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam perlaksanaan kegiatan ini.

Palembang, 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Drs. H. ARINARSA JAYA SURYA
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 197106031999101100 2

KATA PENGANTAR

Kualitas belanja yang baik merupakan kondisi ideal yang ingin di wujudkan dalam pengelolaan APBD. Untuk mendorong tercapainya tujuan dan sasaran tidak hanya di pengaruhi oleh penyerapan belanja saja tetapi harus didukung oleh perencanaan anggaran yang lebih baik, penetapan anggaran yang lebih tepat waktu dan pelaksannan anggaran yang lebih disiplin. Tetapi harus diakui saat ini kondisi tersebut belum sepenuhnya bisa dicapai. Hal itu antara lain tercermin dari pergerakan realisasi penyerapan belanja APBD yang belum berjalan optimal.

Guna memperoleh informasi mengenai hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan melakukan analisis yang dituangkan dalam bentuk laporan monitoring realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 secara berkala yaitu per triwulan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi infomasi mengenai kondisi APBD pada triwulan II tahun 2026 sehingga dapat dijadikan input untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah dengan tujuan mendorong OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya agar kedepan melakukan penyerapan anggaran yang berkualitas dan belanja yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga laporan ini memberikan manfaat bagi pengambilan kebijikan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam perlaksanaan kegiatan ini.

Palembang, 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Drs. H. ARINARSA JAYA SURYA
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 197106031999101100 2

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Gambaran Umum 1
B. Latar Belakang Penyusunan Laporan 3

BAB II EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN .. 5
A. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Triwulan II . 5
B. Kendala yang di hadapi, Saran dan Tindak Lanjut 5

BAB III PENUTUP 7

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Konsekuensi terbit dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik masuk pada urusan Pemerintahan Umum yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan OPD yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik beralih statusnya menjadi Instansi Vertikal.

Kemudian dalam perkembangannya, vertikalisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau instansi yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah di tunda pelaksanaannya sampai dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tetap merupakan OPD Provinsi Sumatera Selatan dibawah Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang penbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

1. Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor). Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci dan dapat dicapai. Untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yang ingin di

capai pada Rencana Strategis (RENSTRA) periode waktu 2025-2029, yaitu Mempertahankan Stabilitas Sosial.

2. Sasaran

Sasaran untuk mewujudkan tujuan di atas adalah pertama Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat dan kedua Penguatan Ketentraman di Masyarakat, dengan Indikator Kinerja Daerah sebagai berikut :

1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Selatan;
2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB);
3. Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan akan menjalankan program pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
c. Program Peningkatan Partai politik dan Lembaga pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisi Kemasyarakatan;
e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya;
f. Program Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Faslitasi penanganan Konflik.

3. Belanja Program dan Kegiatan

Belanja APBD OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. **29.873.819.776,-** (Dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta depalan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam

rupiah). Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yaitu:

Tabel 3.1.
Rekapitulasi Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2026

No.	Uraian	Pagu Anggaran (RP.)	Ket.
1	*2*	*3*	*4*
1.	**Total Belanja APBD**	**29.873.819.776,-**	
	a. Belanja Operasi	**29.578.819.776,-**	
	- Belanja Pegawai	6.989.082.712,-	
	- Belanja Barang Jasa	8.248.846.064,-	
	- Belanja Hibah	14.340.891.000,-	
	b. Belanja Modal	**295.000.000,-**	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,-	
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.000.000,-	

Dalam rangka untuk menjabarkan skala prioritas disusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang dijabarkan melalui beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dituangkan dalam APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari 6 Program 12 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan.

B. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Gubernur Nomor : 001/SE/Bappeda/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah Tahun 2021 serta sebagai bahan masukan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

BAB II

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

A. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Triwulan II

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan II

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target di Triwulan ini	Realisasi di Bulan ini	Target di Akhir Tahun	Realisasi s.d. Bulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3/2 *100%)	(6)	(7)
Total Belanja	**29.873.819.776,-**	**0,-**	**25%**	**0%**	**100%**	**0%**
Belanja Operasi	**29.578.819.776,-**	**0,-**	**25%**	**0%**	**100%**	**0%**
- Belanja Pegawai	6.989.082.712,-	0,-	**25%**	0%	**100%**	0%
- Belanja Barang Jasa	8.248.846.064,-	0,-	**25%**	0%	**100%**	0%
- Belanja Hibah	14.340.891.000,-	0,-	**25%**	0%	**100%**	0%
Belanja Modal	**295.000.000,-**	**0,-**	**25%**	0%	**100%**	0%
-BelanjaModal Peralatan dan Mesin	150.000.000,-	0,-	**25%**	0%	**100%**	0%
-Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.000.000,-	0,-	**25%**	0%	**100%**	0%

B. Kendala yang di Hadapi, Saran dan Tindak Lanjut

1. Kendala :

   Pola penyerapan anggaran yang tidak baik yaitu penyerapan di akhir tahun disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, lemahnya perencanaan kegiatan, lemahnya pelaksanaan kegiatan, kelemahan dibidang pengadaan, kelemahan dibidang regulasi dan ketidaklengkapan regulasi dan prosedur. Dalam pelaksanaan kegiatan sering terjadi keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan dan adanya kehati-hatian dalam

melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga proses pengadaan barang dan jasa tidak segera dieksekusi.

2. Tindak Lanjut yang di Perlukan :

   Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan itu telah dilakukan, namun belum menampakan hasil yang memuaskan. Diantaranya adalah percepatan penyusunan dokumen DPA sebelum awal tahun dan juga telah mempercepat proses pengadaan di LPSE, langkah itu dilakukan agar dapat segera melaksanakan kegiatannya.

BAB III
PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumaterta Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 untuk dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan ke depan. Selanjutnya laporan yang lebih rinci menjadi lampiran pada dokumen ini. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Drs. H. Arinarsa Jaya Surya
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 197106031999011002

BAB III
PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumaterta Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 untuk dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan ke depan. Selanjutnya laporan yang lebih rinci menjadi lampiran pada dokumen ini. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Drs. H. Arinarsa Jaya Surya
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 197106031999101100 2

BAB III
PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumaterta Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 untuk dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan ke depan. Selanjutnya laporan yang lebih rinci menjadi lampiran pada dokumen ini. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Drs. H. Arinarsa Jaya Surya
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 197106031999011002

LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN TAHUN ANGGARAN 2026

OPD : Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Sumatera Selatan

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan(Outcome)	Satuan	Target Kineria	Realisasi Kineria	Pagu (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Sumber dana	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							Realisasi						
							Keuangan %	Rp					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**10.203.694.973**	**36,38**	**3.712.159.487,00**	**0%**	**APBD**	**Palembang**	-	
1	***Kegiatan Perencanaan,Pengaggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah***	***Dokumen***	***7***		***74.300.000***	***0,00***	***0,00***	25%	**APBD**	***Palembang***	-	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokomen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1		12.500.000	0,00	0,00	25%	APBD	*Palembang*	-	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1		61.800.000	0,00	0,00	25%	APBD	*Palembang*	-	
2	***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah***	***Persen***	***100***		***7.371.582.712***	43,55	***3.210.618.378,00***	***25%***	***APBD***	***Palembang***	-	
2.1	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Orang*	36		6.989.082.712	44,90	3.137.928.378,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	*Dokumen*	1		344.000.000	21,13	72.690.000,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
2.3	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Dokumen*	1		21.000.000	0,00	0,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
2.4	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Laporan*	1		10.000.000	0,00	0,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
2.5	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	*Laporan*	1		7.500.000	0,00	0,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
3	***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah***	***Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persen***	***100***		***35.814.000***	***0,00***	-	***25%***	***APBD***	***Palembang***	-	
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	*Orang*	8		35.814.000	***0,00***	0,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
4	***Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah***	***Persentase pelayanan administrasi administrasi umum Perangkat Daerah***	***Persen***	***100***	***100***	***406.760.180***	***7,21***	***29.313.359,00***	*25%*	***APBD***	***Palembang***	-	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompnen Alat Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	*Paket*	1		40.000.000	***0,00***	0,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	*Paket*	1		110.000.000	***0,00***	0,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan(Outcome)	Satuan	Target Kineria	Realisasi Kineria	Pagu (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Sumber dana	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							Realisasi						
							Keuangan %	Rp					
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	*Paket*	1		70.000.000	***0,00***	0,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1		20.000.000	***0,00***	0,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1		160.760.180	***18,23***	29.313.359,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
4.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1		6.000.000	***0,00***	0,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
5	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah pengadaan barang milik daerah***	***Jenis***	***25***	***25***	***150.000.000***	***0,00***	***0,00***	*25%*	***APBD***	***Palembang***	-	
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang Disediakan	*Unit*	36		150.000.000	***0,00***	0,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
6	***Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah***	*Persen*	***100***	***100***	***1.560.238.081***	***30,00***	***468.067.914,00***	***25%***	***APBD***	*Palembang*	-	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*laporan*	1		8.000.000	***0,00***	0,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	*laporan*	1		311.265.881	***26,03***	81.012.914,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*laporan*	1		1.240.972.200	***31,19***	387.055.000,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
7	***kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase pemeliharaan barang milik Daerah***	***Persen***	***100***	***100***	***605.000.000***	***0,69***	***4.159.836,00***	***25%***	***APBD***	***Palembang***	-	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*Unit*	36		400.000.000	*1,04*	4.159.836,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Unit*	1		145.000.000	*0,00*	0,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	*Unit*	80		60.000.000	*0,00*	0,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
II	**Program Penguatan Ideologi pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase masyarakat yang mengimplementasi dan mengaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila**	**Persen**	**78,5%**	**78,5%**	**4.465.800.000**	**0,27**	**11.888.000,00**	***25%***	**APBD**	**Palembang**	-	

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan(Outcome)	Satuan	Target Kineria	Realisasi Kineria	Pagu (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Sumber dana	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							Realisasi						
							Keuangan %	Rp					
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
8	***Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakteristik Kebangsaan***	***Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	***Dokumen***	***6***	***6***	***4.465.800.000***	***0,27***	***11.888.000,00***	*25%*	***APBD***	Palembang		
8.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	250		101.600.000	0,00	0,00	*25%*	APBD	Palembang	-	
8.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	1		24.200.000	0,00	0,00	*25%*	APBD	Palembang	-	
8.6	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Anggota Paskibraka	Orang	50		4.340.000.000	0,27	11.888.000,00	*25%*	APBD	Palembang	-	
III	**Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	**Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik**	**Persen**	**80**	**80**	**14.614.044.889**	**0,30**	**44.464.530,00**	***25%***	**APBD**	**Palembang**	**-**	
9	***Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik***	***Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik***	***Dokumen***	***7***	***7***	***14.614.044.889***	***0,30***	***44.464.530,00***	***25%***	***APBD***	***Palembang***	**-**	
9.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	2		20.000.000	0,00	0,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
9.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	14.474.107.794	0,21	30.490.341,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
9.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Orang	100		26.449.212	45,36	11.998.423,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan(Outcome)	Satuan	Target Kineria	Realisasi Kineria	Pagu (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Sumber dana	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							Realisasi						
							Keuangan %	Rp					
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
9.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Orang	100		26.449.212	45,36	11.998.423,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
9.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi.Politik di Daerah yang Disusun	Orang	500		58.487.883	3,38	1.975.766,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
9.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	1		35.000.000	0,00	0,00	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
IV	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Ormas Yang berkinerja**	**Persen**	**5**	**5**	**136.300.000**	**0,00**	**0,00**	***25%***	**APBD**	**Palembang**	-	
10	***Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan***	***Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan***	*dokumen*	3	3	***136.300.000***	***0,00***	***0,00***	***25%***	***APBD***	***Palembang***	-	
10.4	Pelaksanaan Kordinasi Di bidang Pendaftaran ormas ,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang pendafaran ormas Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Orang	200		54.300.000	0,00	0,00	*25%*	APBD	Palembang	-	
10.5	Pelaksanaan Monitoring Di bidang Pendaftaran ormas ,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang pendafaran ormas Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Laporan	1		82.000.000	0,00	0,00	*25%*	APBD	Palembang	-	
V	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya**	**Persentase Mitra yang Mendukung Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Persen**	**100**	**100**	**140.000.000**	**14,46**	**20.237.388,00**	**25%**	**APBD**	**Palembang**	-	

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan(Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Sumber dana	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							Realisasi						
							Keuangan %	Rp					
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
11	***Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya***	***Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***	dokumen	3	3	***140.000.000***	**14,46**	***20.237.388,00***	***25%***	***APBD***	**Palembang**	-	
11.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang MengikutiPelaksanaan Kebijakani Di bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika ,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	500		70.000.000	13,83	9.679.028,00	*25%*	APBD	Palembang	-	
11.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Di bidang Program Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika ,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	300		70.000.000	15,08	10.558.360,00	*25%*	APBD	Palembang	-	
VI	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Penurunan Kasus yang Berpotensi Konflik Sosial**	**Persen**	**80**	**80**	**313.979.914**	**2,55**	**8.000.000,00**	**25%**	**APBD**	**Palembang**	**-**	
12	***Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***	***Terlaksanannya perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***	***dokumen***	6	6	***313.979.914***	***2,55***	***8.000.000,00***	***25%***	***APBD***	***Palembang***	-	
12.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah Yang Disusun	*dokumen*	3		37.484.959	*0,00*	*0,00*	*25%*	APBD	*Palembang*	-	
12.2	Penyusunan bahan Perumusan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah Yang Disusun	*dokumen*	3		30.748.750	*0,00*	*0,00*	25%	APBD	*Palembang*	-	
12.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	*Orang*	100		41.500.000	19,28	8.000.000,00	25%	APBD	*Palembang*	-	

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan(Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Sumber dana	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							Realisasi						
							Keuangan %	Rp					
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
12.4	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	*Orang*	400		59.596.205	0,00	0,00	25%	APBD	*Palembang*	-	
12.5	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan hasil Monitoringi diBidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	1		25.000.000	0,00	0,00	25%	APBD	*0,00*	-	
12.6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	dokumen	1		119.650.000	0,00	0,00	25%	APBD	Palembang	-	
	Jumlah : 39 Sub Kegiatan					**29.873.819.776**	**12.71**	**Rp3.796.749.405**	**25%**				

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Drs. H. ARINARSA,JS
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 197106031991011002